

## Pendidikan Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di Perguruan Tinggi Islam

<sup>1</sup>Ahmad Nurul Huda, <sup>2</sup>Husni Rahim

<sup>1</sup>STAI Madinatul Ilmi Depok, <sup>2</sup>SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>[hudaahmadun@gmail.com](mailto:hudaahmadun@gmail.com), <sup>2</sup>[husni.rahim@uinjkt.ac.id](mailto:husni.rahim@uinjkt.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to studies the role model of tolerance education for Sunni and Shia of thought at islamic college with students who understand various theologies. This study was carried out by analyzing the policies of the leadership in supporting tolerance. Than, the researcher described the application of the educational tolerance program at islamic college in instilling a culture of tolerance for Sunni and Shia schools of thought. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach, which is described in a descriptive analytical manner based on experience and awareness of the phenomena that occur. The methods used in data collection are observation, interviews and documentation. The thesis statement in this study is that tolerance between Sunni and Shia at islamic college can be realized through accommodative, inclusive and humanist policies both formally in academic and non-formal programs which are supported by facilities in the form of boarding programs. The existence of empirical capital in the form of the experience of the heterogeneity of the Indonesian nation, and historical capital in the form of the contextualized romance of Sunni and Shia tolerance, can become a reference and supporting factor for the construction of tolerance education between schools of thought at islamic college.*

**Keywords:** *Tolerance Education; Sectarian Tolerance; Hidden Curriculum; Sunni-Shia.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang *role model* pendidikan toleransi mazhab Sunni dan Syiah di Perguruan Tinggi Islam dengan mahasiswa yang paham teologinya beragam. Pengkajian tentang itu dilakukan dengan menganalisa kebijakan pimpinan dalam mendukung toleransi. Setelah itu peneliti mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan toleransi di Perguruan Tinggi Islam dalam menanamkan budaya toleransi mazhab Sunni dan Syiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang diuraikan secara deskriptif analitis berdasarkan pengalaman dan kesadaran atas fenomena yang terjadi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. *Thesis statement* dalam penelitian ini adalah bahwa toleransi antara Sunni dan Syiah di Perguruan Tinggi Islam dapat terwujud melalui kebijakan yang akomodatif, inklusif dan humanis baik secara formal dalam program akademik maupun non-formal yang ditunjang dengan fasilitas berupa program boarding. Adanya modal empirik berupa pengalaman heterogenitas bangsa Indonesia, dan modal historis berupa romansa toleransi Sunni dan Syiah yang dikontekstualisasikan, mampu menjadi acuan dan faktor pendukung konstruksi pendidikan toleransi antar mazhab di Perguruan Tinggi Islam.

**Kata Kunci:** Pendidikan Toleransi; Toleransi Mazhab; Kurikulum Terselubung; Sunni-Syiah.

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, jaminan terhadap hak kelompok minoritas suatu mazhab dan agama masih belum maksimal (Rosyid, 2013). Kelompok minoritas yang dimaksud adalah suatu golongan yang memiliki tradisi pemikiran, keyakinan dan berbagai ritus keagamaan yang berbeda dengan kelompok *mainstream*. Hingga sampai pada satu titik di mana kelompok minoritas tidak hanya dianggap sebagai suatu entitas berbeda namun juga dianggap menyimpang, menodai bahkan menistakan keyakinan kelompok mayoritas dalam suatu keyakinan tertentu (Solikhin, 2016). Oleh sebab itu, di Indonesia masih sering ditemui kejadian-kejadian anarkis yang menunjukkan sikap intoleransi yang berakibat pada jatuhnya korban oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap kaum minoritas. Misalnya tragedi pembakaran rumah dan pengusiran warga Syiah di Sampang, Madura, yang hingga saat ini belum tuntas; pengrusakan lembaga pendidikan di desa Puger, kabupaten Jember yang pendirinya dituduh menyebarkan ajaran sesat; kekerasan dan persekusi terhadap Jemaah Ahmadiyah di beberapa tempat serta berbagai tragedi lain yang sama sekali tidak mencerminkan nilai kultur Nusantara (Zuhdi, 2018).

Munculnya kebanyakan konflik di tengah-tengah perbedaan –suku maupun kepercayaan– seringkali disinyalir akibat fanatisme (Robinson, 1996). Fanatisme kelompok/golongan sering bersembunyi di dalam selimut ‘ideologi paripurna’ sebagai legitimasi, yang mengakibatkan timbul dan berkembangnya suatu perselisihan dan konfrontasi di ruang publik (Yunus, 2014). Dalam arti, demi menjaga eksistensi dan dominasi kelompok atau golongannya, seseorang cenderung gemar mengatasnamakan keyakinan beserta dalil-dalil favorit baginya sebagai landasan propaganda (Azra, 2014). Sehingga hal itu dapat meyakinkan para simpatisannya untuk senantiasa membela, mendukung dan membenarkan upaya tersebut. Dengan demikian maka muncullah sebuah sekte tertentu. Fanatisme kelompok/golongan sebagai pijakan utama ini biasanya terjadi pada kelompok-kelompok intra-mazhab atau bisa juga antar-mazhab. Bisa jadi karena saling berebut pengaruh atas umat dalam wewenang keagamaan atau motif lainnya (Maarif, 2012). Fanatisme suatu kelompok yang cenderung mengklaim pihak lain menyimpang, tentu sangat potensial memicu lahirnya ekstrimisme yang rentan terhadap konflik sekecil apapun hingga dalam skala besar (Khamdan, 2016).

Indonesia merupakan salah satu contoh sebuah negara dengan masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakatnya bukan hanya pada sisi keragaman suku, budaya, ras dan bahasa saja, melainkan juga keragaman dalam sisi ideologi atau keyakinan (Khotimah, 2013). Dalam konteks ini, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Beberapa agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Huchu adalah keyakinan resmi yang mesti dianut oleh masyarakat. Agama-agama resmi tersebut meskipun memiliki titik temu berkenaan dengan norma dalam menjalani kehidupan sosial antar para pemeluknya, pastilah juga terdapat ragam perbedaan yang terkandung dalam ajaran praktik atau ritus-ritus peribadatnya. Oleh karena itu, jika perbedaan tersebut tidak dipelihara dengan baik, maka hal itu bisa berpotensi menimbulkan gesekan antar-umat beragama yang bertentangan dengan norma, serta nilai dasar yang tertanam dalam agama itu sendiri (Nazmudin, 2018).

Jika diamati dewasa ini, konflik komunal yang melibatkan agama-agama di Indonesia bisa dikatakan terkendali seiring dengan proses kedewasaan dalam bernegara (Rosyada, 2014). Walaupun terkadang masih saja ada kelompok-kelompok ekstrimis dari tiap-tiap pemeluk agama tertentu mencoba menyulut api konflik dengan bermacam-macam cara seperti teror saat umat dari salah satu agama sedang menjalani ibadah, atau sedang merayakan tradisi hari besar dengan provokasi dan bahkan ancaman fisik berupa

persekusi hingga ledakan bom. Namun aksi-aksi semacam itu mampu diurai dengan bijak baik oleh aparaturnegara maupun oleh organisasi-organisasi keagamaan yang merasa bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan antar anak bangsa. Tetapi, yang masih menjadi 'PR' besar bagi pemerintah adalah persoalan sektarianisme dalam agama yang seakan tak kunjung selesai. Sebut saja ketegangan antara penganut mazhab Sunni dengan penganut mazhab Syiah (Formichi, 2014).

Pemaparan di atas relatif cukup sebagai genealogi ketegangan antar dua pemikiran berbasis teologi tersebut. Bahkan ketegangan yang muncul sudah beberapa kali menjelma menjadi konflik kekerasan, hingga mengakibatkan jatuhnya korban nyawa dan perampasan hak-hak hidup bernegara (Akmaliah, 2015). Maka dengan memerhatikan pelbagai potensi tersebut, banyak penulis dan pakar pendidikan berpendapat bahwa salah satu problem utama dalam pembelajaran di sekolah, yang memengaruhi segala fenomena di tengah masyarakat adalah problem metodologi pembelajaran. Dan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah adalah melakukan rekonstruksi pada aspek metodologi, dari yang bersifat dogmatis, doktriner dan tekstual menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis, praktis dan kontekstual (Asrori, 2016).

Dalam upaya memenuhi rekonstruksi pada aspek metodologi tersebut, toleransi dalam perbedaan semestinya ditopang oleh partisipasi aktif dari tiap-tiap individu dan golongan, karena sebuah misi persatuan dan persaudaraan tidak akan pernah tercapai jika landasan utama dalam pemenuhan hak tiap-tiap kelompok hanya condong pada doktrin internal satu kelompok (Umam, 2016). Sejatinya pemahaman tentang toleransi tidak hanya sebatas konsep normatif yang hanya dibaca dan dipahami pengertiannya saja. Mengingat bahwa toleransi itu dapat ditinjau dari tiga hal yang tak terpisahkan, yakni toleransi sebagai sebuah ide, gerakan dan proses (Anisca Dyah Permata Sari & Setyabudi Indartono, 2019). Jika tidak, maka wajar jika perbedaan pandangan yang sebetulnya sederhana, bisa menjadi 'bola salju' yang berujung pada terjadinya konflik yang besar. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah program terstruktur, sistematis dan masif dari pemegang kendali pendidikan untuk menginterpretasikan, serta mengimplementasikan nilai toleransi dalam proses pembelajaran dan di tengah masyarakat, seperti yang didambakan oleh umat beragama di Indonesia (Casram, 2016).

Hal yang luput dari perhatian para pendidik secara umum adalah bahwa selain perbedaan ras, suku dan budaya, setiap peserta didik di suatu lembaga pendidikan –baik pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah maupun Pendidikan Tinggi– itu memiliki latar belakang keyakinan/ideologi yang beragam. Dewasa ini, kebanyakan para peneliti melibatkan diri mereka dalam menganalisis/meneliti tentang perbedaan dan keragaman agama yang dianut oleh peserta didik, sehingga jarang sekali yang berupaya menyentuh ranah *khilafiyah* dalam suatu agama, yakni mazhab. Sejatinya para penganut mazhab yang berbeda-beda itu masing-masing perlu difasilitasi dengan bijak, baik dalam bentuk materi/bahan ajar maupun dalam bentuk kebijakan program, sejauh mana dapat menjamin hak-hak mereka dalam menganut dan menjalankan keyakinannya, sehingga terus berkembang sesuai ritmenya tanpa mengkhawatirkan risiko yang akan menimpa para peserta didik, minimalnya di lingkungan lembaga tempat mereka menimba ilmu, terlebih lagi ketika berada di lingkungan masyarakat umum (Tamsir, 2018).

Dari beberapa fenomena konfrontasi komunal di atas, sebagai sasaran pendidikan toleransi di samping minimnya metodologi pendidikan yang inovatif-praktis, maka stabilitas sosial di Indonesia sebagai bangsa multikultural sebagaimana telah dipaparkan, suatu saat akan terancam. Maka sudah saatnya para praktisi pendidikan memerhatikan hal ini melalui program-program pendidikan kontekstual sebagai bentuk sumbangsih mereka terhadap bangsa, demi melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang muncul dari berbagai macam latar belakang suku, budaya dan keyakinan (Jirzanah, 2013). Dengan

begitu, ke depannya bangsa Indonesia akan menjadi simbol serta poros perdamaian dan harmoni dalam skala global. Untuk itu artikel ini dibuat sebagai gambaran dalam penerapan nilai-nilai toleransi dalam bermazhab di Perguruan Tinggi Islam, secara khusus adalah Sunni dan Syiah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana menurut Hegel, pendekatan ini melibatkan sebuah pengalaman dan kesadaran atas sebuah fenomena. Dalam hal ini peneliti menekankan pada karakteristiknya yang deskriptif (Moustakas, 2009). Sebab, peneliti lebih terfokus untuk mengamati dan memaknai fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, di mana data-data yang didapatkan senantiasa diuraikan dalam bentuk penjelasan berupa laporan narasi, sebagai hasil penjelasan terhadap suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian (Rosyada, 2020). Adapun sasaran penelitian ini adalah STAI Sadra Jakarta, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang memiliki program *boarding* (asrama). Di mana asrama menjadi ajang toleransi antara mahasiswa bermazhab Sunni dan Syiah. Setiap mahasiswa yang beragam ideologi tersebut mendapatkan fasilitas secara berimbang dalam memeraktikkan ritus peribadatan sesuai dengan yang mereka yakini dalam ketentuan mazhab mereka (Huda, 2023). Dengan ini, peneliti berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek. Peneliti memilih pendekatan fenomenologi karena peneliti yakin bahwa suatu penelitian atau keadaan akan terlihat keasliannya ketika diamati dan dideskripsikan atau digambarkan (Mulyana, 2010). Selain itu, pendekatan ini akan mendorong peneliti untuk dapat menelaah data sebanyak mungkin mengenai subjek dan memahami situasi sosial secara mendalam serta mampu mengungkapkan gambaran secara nyata.

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, wawancara dan observasi. Studi dokumen meliputi *website* resmi STAI Sadra yang menginspirasi dilakukannya penelitian ini. Pedoman akademik, renstra, Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Sedangkan prosesi wawancara, informan yang terlibat dalam menunjang kelengkapan data adalah ketua, wakil ketua bidang akademik dan bidang kemahasiswaan, pembina program *boarding*, dosen dan mahasiswa. Wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur melalui rancangan kisi-kisi yang terukur dan mendalam. Adapun observasi, peneliti melakukannya secara langsung dan tidak langsung, yaitu masih perlu melibatkan pihak STAI Sadra untuk dapat membantu penggalian data yang dibutuhkan. Selain itu, prosesi observasi juga dilakukan secara terjadwal baik *offline* (peneliti datang langsung ke lapangan penelitian) dan *online* (melalui aplikasi *zoom cloud meetings*) saat perkuliahan formal akademik.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Selayang Pandang Toleransi dalam Islam**

*Role model* praktik toleransi pertama kali dalam sejarah Islam tentu pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Pasca peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekkah, Islam benar-benar berada dalam masa kejayaan, di mana Nabi dan para sahabat sudah bisa menunjukkan eksistensi Islam secara *kaffah* baik keyakinan maupun praktik ritual ibadah. Walaupun begitu, keberadaan agama-agama yang sejak awal sudah eksis di Madinah seperti Yahudi dan Nasrani tetap ada. Dalam arti tidak semua penduduk Madinah waktu itu seluruhnya memeluk agama Islam. Namun karakteristik dakwah Nabi Saw. tidak agresif untuk memaksa orang-orang Yahudi dan Nasrani agar memeluk agama Islam. Maka demi menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif, dibentuklah 'Piagam Madinah' sebagai strategi untuk menjaga stabilitas sosial yang multi-

agama tersebut. Ada 47 pasal perjanjian yang termaktub dalam 'Piagam Madinah' tersebut yang di dalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masyarakat di Madinah, termasuk kebebasan beragama (Khasani, 2021). Dari perjanjian yang sudah disepakati itu, Nabi Saw. sebagai kepala negara berhak menindak siapapun yang melanggar isi perjanjian yang terkandung demi terciptanya kerukunan umat sesuai dengan hukum yang berlaku (Erman, 2011).

Praktik toleransi sering kali berkaitan dengan persoalan kepemimpinan. Dalam lingkaran kepemimpinan setidaknya terdapat unsur pemimpin atau penguasa baik formal maupun non formal, dan unsur masyarakat atau orang-orang yang berada dalam kendali penguasa yang menggantungkan nasib sosialnya. Kepentingan dalam hidup masyarakat dalam suatu kekuasaan penguasa adalah sebuah realitas. Sejauh mana seorang pemimpin mahir dalam menjalankan roda kepemimpinannya, sejauh mana ia mampu bersikap bijaksana, sejauh mana ia dapat bertindak adil terhadap warganya, maka di sanalah terdapat persatuan, perdamaian, kesejahteraan dan solidaritas antar sesama warga, begitupun sebaliknya. Pemimpin yang baik harus mampu mengakomodasi pluralitas perspektif orang-orang yang dipimpinnya sebagaimana yang diperankan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagaimana termaktub dalam sejarah peradaban Islam.

Menurut al-Ghazali, toleransi harus sejalan dengan akal dan keadilan. Ia tidak serta merta menjerumuskan pada kesesatan dan berseberangan dengan nilai dasar kebenaran. Dengan kata lain, toleransi bukanlah suatu ketidakpedulian, kecenderungan menolak terhadap kebenaran atau kepuasan akan ketidaktahuan. Menurutnya, inilah pengertian toleransi yang dianggap sebagai kunci komponen pendidikan dalam tradisi Islam (Alhashmi, Bakali, & Baroud, 2020). Pendapat ini dikuatkan oleh Gulen yang menyatakan bahwa toleransi itu tidak berarti terpengaruh oleh orang lain hingga menjadikannya bergabung bersama mereka. Artinya, seseorang tidak harus menghilangkan identitas asli sebagai individu yang memiliki keyakinan. Karena sejatinya toleransi itu berarti menerima orang lain sebagaimana adanya, dan memahami bagaimana cara bergaul dengan mereka. Bahkan lebih jauh, dari beberapa lembaga pendidikan yang ia kelola di banyak negara, ia mengintegrasikan cinta dan toleransi dalam kurikulum pendidikan di lembaga tersebut. Karena cinta dan toleransi, merupakan esensi dari ekspresi manusia. Berbagai kerusakan dan kekerasan merupakan akibat dari tiadanya cinta kasih (Gülen, 2004).

Ibnu Khaldun menuturkan bahwa persatuan pada masyarakat bisa terbentuk melalui '*ashabiyah*'. '*Ashabiyah*' yang dimaksud tentu dalam makna konstruktif yaitu rasa saling terikat satu sama lain baik dalam hubungan darah maupun kepentingan bersama untuk sampai pada satu tujuan bersama. Tentu '*ashabiyah*' yang menyimpang atau destruktif, akan senantianya melahirkan fanatisme yang mengerikan, dan ini yang tidak diharapkan. Melalui '*ashabiyah*' dengan makna positif tersebut, maka solidaritas yang muncul sebagai buah dari perjuangan dalam mempertahankan kepentingan bersama akan senantiasa menguat. Bahkan perasaan saling menjaga, membela, bekerjasama dan mengesampingkan kepentingan pribadi, akan menciptakan integrasi dan keselarasan sosial. Khaldun meyakini bahwa sebuah negara tidak akan bertahan lama jika '*ashabiyah*' tidak dimiliki oleh segenap elemen negara. Karena untuk menjaga stabilitas serta eksistensi suatu negara itu hakekatnya membutuhkan tanggung jawab bersama. Ia juga menegaskan bahwa agama juga mampu menjadi pemersatu yang bisa meredakan berbagai konflik horizontal. Secara khusus agama Islam, terdapat konsep tauhid sebagai landasan utama yang menyatukan segala perbedaan *furu'* yang terjadi dalam agama (Abou-Tabickh, 2019).

Lebih lanjut Maarif menegaskan bahwa faham '*ashabiyah*' (kesukuan) dikutuk Islam jikalau faham tersebut dipahami sebagai keberlanjutan dari sukuisme. Kecuali bila dikaitkan dengan nasionalisme bernegara, dalam konteks sejarah Indonesia yang lebih

mencerminkan pada patriotisme saat berhadapan dengan kaum penjajah, maka posisi *ashabiyah* akan berbeda. Senada dengan pandangan di atas, Jalaluddin Rakhmat turut memberikan pandangan, bahwa '*ashabiyah* tidak dibenarkan jika tidak sejalan dengan 'tali' Allah Swt. yang berarti berada di jalan selain-Nya, karena hal itu justru menjadi sebab munculnya nepotisme, bahkan *tafarruq* atau perpecahan. Menurutnya, faktor yang menyebabkan orang Islam menjauh dari jalan-Nya adalah: kurangnya pengetahuan tentang Islam; kedengkian terhadap sesama orang Islam, tidak mau memfungsikan akal; kecintaan pada dunia; dan tidak menyerahkan kepercayaan atau kepemimpinan kepada kaum Muslim (Maarif, 2012).

Implementasi toleransi pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia cukup variatif. Perguruan Tinggi/kampus merupakan etalase suatu negara karena biasanya diisi oleh segenap unsur dan atau mahasiswa dari berbagai penjuru bangsa. Mengingat bahwa mahasiswa adalah gradasi tertinggi seorang pelajar sebagai calon pelaku kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah toleransi dalam ranah individu, organisasi, etnis/suku, budaya, dan agama. Kunci terlaksananya pendidikan toleransi itu adalah manajemen pendidikan yang profesional, pendidikan karakter, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan upaya untuk menanamkan sikap toleransi antara lain: memahami perspektif orang lain; memupuk sikap empati; budaya berdiskusi; menghargai perbedaan; dan mempelajari budaya orang lain.

## **2. Toleransi Bermazhab dalam Kebijakan Lembaga Pendidikan**

Perguruan Tinggi atau kampus merupakan miniatur sebuah kehidupan suatu negara, karena biasanya diisi oleh berbagai unsur, baik dosen, staf maupun mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru bangsa. Warga Perguruan Tinggi dicirikan sebagai masyarakat dengan tingkat budaya yang beragam, dinamis serta memiliki nilai-nilai tinggi (Al-Badayneh, n.d.). Oleh karenanya, dalam pendidikan formal, status mahasiswa berada dalam gradasi tertinggi bagi seorang pelajar sebagai calon pelaku kehidupan bermasyarakat. Di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, ranah toleransi cukup variatif. Di antaranya adalah toleransi dalam ranah individu, organisasi, etnis/suku, budaya, dan ideologi yang meliputi agama dan ragam keyakinan di dalamnya (Muawanah, 2019). Kunci terlaksananya pendidikan toleransi itu adalah manajemen pendidikan yang profesional, pendidikan karakter, '*school culture*' dan wawasan kebangsaan. Sedangkan upaya untuk menumbuhkan sikap toleransi antara lain: memahami perspektif orang lain dan mempelajari budayanya; memupuk sikap empati; budaya berdiskusi; dan menghargai perbedaan (Subarkah, 2018).

Adapun kebijakan sebagai poros operasional Perguruan Tinggi dengan segenap program yang terstruktur diterapkannya toleransi di kalangan mahasiswa, dapat membantu menetralsisir segala situasi yang terindikasi menampilkan kesenjangan sosial oleh sebab perbedaan latar belakang di tengah masyarakat (Khakim, Nugraha, Sukanti, & Sarwedi, 2020). Terlebih Perguruan Tinggi tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam, di mana sarat dengan dugaan stigmatis, antara penganut Islam moderat atautkah Islam konservatif (Zuhdi, 2018). Perdebatan atas dugaan tersebut bahkan sampai pada skala internasional, bahwa lembaga pendidikan Islam secara umum dicurigai membawa pengaruh intoleransi dalam kehidupan beragama (Elbih, 2012). Tentu berbagai dugaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat bahwa isu kekerasan dan konflik terindikasi dari doktrin-doktrin yang berasal dari lembaga pendidikan Islam. Padahal faktanya, banyak lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia justru tampil sebagai penggagas toleransi, dan turut dalam mengampanyekannya untuk menjalani hidup berdampingan antar entitas yang berbeda dengan penuh keharmonisan (Alhashmi et al., 2020).

### a. Pendidikan Toleransi dalam Kebijakan Pimpinan

Kerangka pendidikan toleransi tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia yang paling ideal adalah dengan diberlakukannya Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, 2012). Sebab dengan keempat unsur tersebut, segenap potensi persoalan yang berkaitan dengan ideologi baik negara maupun agama, perbedaan suku serta bahasa, sejauh ini dapat terakomodasi dengan baik dalam satu rasa sekalipun dalam warna yang beragam. Oleh sebab itu, STAI Sadra memiliki asas dan tujuan yang terkonsep secara sistematis dalam pemberlakuan kebijakan pendidikan. Teruntuk mata kuliah kewargaan, sivitas STAI Sadra dalam konteks Pancasila sebagai landasan ideologi segenap warga Indonesia, menentukan mata kuliah *Civic Education* dengan istilah Falsafah Pancasila. Dengan istilah tersebut seolah menjadikan filsafat sebagai pijakan dasar dalam penggalan serta pengkajian tentang nilai-nilai luhur Pancasila (“Kurikulum STFI Sadra,” 2021). Hal ini senada dengan misi ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam peraturan itu disebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter seyogyanya dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pandangan, pola pikir, cara bertindak dan bertingkah laku (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penguatan Pendidikan Karakter*, 2017).

Wacana toleransi bermazhab, di mana praktik hidup berdampingan antar penganut mazhab yang mengarah pada akulturasi walaupun belum memiliki regulasi yang baku di Indonesia sebenarnya telah sejak lama memiliki ‘payung’ dalam kerangka Tri Kerukunan Umat Beragama. Salah satu dari tiga prinsip itu adalah kerukunan intern umat beragama yang mengarah pada aliran atau mazhab dalam Islam (Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, 2018). Proposisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak termaktub secara jelas dan rinci, mazhab Syiah yang merupakan sekte resmi dalam Islam, berhak tumbuh dan berkembang di Indonesia (Siradj, 2013). Maka keberadaan STAI Sadra, dalam perannya memfasilitasi segala kegiatan peribadatan dengan corak kemazhaban antara penganut Sunni dan Syiah, sama sekali tidak sedang memelihara suatu budaya ‘kontroversial’ yang mengganggu tatanan sosial di Indonesia. Keberadaannya justru memberikan sumbangsih dalam mengejawantahkan prinsip dibentuknya Tri Kerukunan Umat Beragama. Sehingga dengan demikian STAI Sadra turut andil dalam menyukseskan pembangunan nasional serta menjaga nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga dalam rangka membumikan Pancasila dalam konteks persatuan Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.

Adanya fakta bahwa populasi mahasiswa yang bermazhab Syiah tidak lebih dominan dari total keseluruhan mahasiswa jika dibandingkan dengan mahasiswa bermazhab Sunni, dengan perbandingan Sunni 76,7% dan Syiah 23,3% dari total 296 mahasiswa aktif, di lembaga pendidikan yang identik dengan pemikiran serta ideologi seorang tokoh Syiah yang dijadikan sebagai label (Mulla Shadra), merupakan wujud dari moderasi kebijakan yang diterapkan di STAI Sadra –di mana lembaga memiliki kuasa dan hak dalam penerapan mazhab Syiah–. Moderasi tersebut jelas mengarah pada misi toleransi yang implementatif dengan segala seluk beluknya, yang jarang diterapkan di Perguruan Tinggi sejenisnya. Secara faktual, realitas akan jumlah populasi tersebut bisa dipahami karena, di satu sisi tentu jumlah komunitas Syiah di Indonesia tidak banyak serta tidak semua generasi mereka berminat untuk belajar filsafat dan ilmu tafsir. Selain itu, karena tuntutan keterbukaan sikap sebagaimana dalam salah satu misi yang diusung yaitu “mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*” (Al-Walid, 2020). Islam sebagai rahmat bagi alam semesta tidak akan terwujud tanpa adanya praktik hidup

berdampingan antar entitas atau kelompok yang berbeda satu sama lain (Bassar, Ruswandi, & Erihadiana, 2021).

#### 1) Atmosfir Akademik yang Inklusif

Atmosfir akademik atau seringkali diistilahkan dengan suasana akademik adalah hal yang mesti mampu dibangun oleh sebuah Perguruan Tinggi, dalam menciptakan proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan koridor visi, misi dan tujuan yang diusung. Atmosfir akademik yang kondusif tentu melibatkan interaksi aktif baik antar dosen, antar mahasiswa maupun dosen dan mahasiswa. Di mana masing-masing mereka terlibat dalam memberikan kontribusi yang positif. Atmosfir akademik di seluruh Perguruan Tinggi dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan agar tetap dinamis, dialogis dan kritis (Purnomo & Solikhah, 2021). Namun agar kebebasan tersebut tidak menjadi bola liar dan melenceng dari nilai-nilai luhur pendidikan dan demi mempertahankan integritas serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi, STAI Sadra dengan teguh berpacuan pada poin penting dalam misi pertama yaitu "kebebasan berpikir dan moral islami" agar berjalan seimbang (*Laporan Evaluasi Diri Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam STFI Sadra*, 2019). Sehingga pendidikan berlangsung sebagaimana mestinya di setiap prosesnya.

Betapa keseimbangan itu menjadi suatu hal yang penting dan harus diperhatikan dalam proses pendidikan agar tidak terjebak dalam pandangan dunia selain Islam yang luhur. Oleh sebab itu, al-Attas menekankan pentingnya integrasi kompetensi akademik dan moral. Sasaran pendidikan idealnya mampu menyentuh ranah fisik dan spiritual, karena nilai pendidikan yang sesungguhnya bukan terletak pada keberhasilan formal melainkan mencakup juga nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan (Al-Attas & Jāmi'at al-Malik 'Abd al-'Azīz, 1979). Dengan demikian akan tampak sebuah implikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semestinya menjadikannya semakin bijaksana baik sikap maupun karakter. Selain itu, sebagai kurikulum Perguruan Tinggi, KKNi memiliki empat kriteria capaian pembelajaran. Empat kriteria tersebut meliputi: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab (TIM PENGEMBANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI, 2017). Dari keempat kriteria tersebut, sikap dan tata nilai merupakan karakter yang mesti terinternalisasi dalam diri individu selama proses belajar. Sikap dan tata nilai juga memiliki peran penting dalam membentuk jati diri bangsa yang toleran (Nurdin, 2018).

Toleransi sebagai bagian dari uraian nilai pendidikan karakter mutlak diperlukan dalam suasana akademik, baik dalam penggalan berbagai keilmuan maupun dalam praktik sosial di luar kegiatan kelas. Dengan sifatnya yang dinamis, dialogis dan kritis, berbagai cakrawala keilmuan bisa hadir di lingkungan tersebut. Maka dengan munculnya berbagai cakrawala keilmuan yang boleh jadi mendatangkan kebaruan pandangan, perbedaan persepsi dan sebagainya, hal itu seringkali memicu perdebatan yang panjang. Terkadang situasi menjadi sulit terkendali tanpa ditopang dengan sikap toleransi. Toleransi dalam hal ini meniscayakan suatu sikap inklusif dan terbuka serta menghargai pendapat orang lain yang memiliki perbedaan pandangan (Hasanah ., 2013). Dalam proses pembelajaran, dosen sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan terlebih dahulu mesti tampil terdepan sebagai pribadi yang toleran, moderat dan berimbang dalam penyampaian materi perkuliahan. Tentu dengan tidak serta merta secara 'vulgar' menyinggung isu-isu sensitif berkaitan dengan perbedaan persepsi mahasiswa tentang mazhab mereka. Oleh karena itu, semua materi ajar disajikan secara argumentatif sesuai kaidah-kaidah saintifik berdasarkan pada literatur-literatur yang otoritatif (Adnani, 2020). Di samping itu, sajian materi didukung dengan penerapan

metode belajar *student centered learning* dengan pendekatan dialogis dalam suasana penuh kebebasan akademis dan demokratis, di mana mahasiswa memiliki peran sentral dalam mengembangkan kemampuan berpikir, tanpa intervensi yang masif dari para dosen untuk memberikan doktrin yang tendensius dan jauh dari nilai-nilai saintifik.

## 2) Lingkungan Institusi sebagai Ajang Perdamaian Interpretasi Fiqih

Ihwal pengalaman sebagai sebuah 'nilai jual' yang dikonstruksi oleh sebuah institusi pendidikan dapat sedemikian efektif dalam memengaruhi perubahan nilai, persepsi dan perilaku. Tentu dengan adanya pengawasan dan bimbingan kepada para pelajar, selain program yang terstruktur dalam kegiatan formal di kelas. Pengalaman-pengalaman tersebut biasanya muncul di area-area yang kerap menjadi ajang interaksi antar mahasiswa. Walaupun tidak secara langsung, keberadaan lingkungan, kultur dan kebijakan yang dibentuk oleh sebuah institusi dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Hal ini bisa dipahami karena porsi waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran di kelas itu amatlah singkat. Oleh karenanya, berbagai pengalaman di luar kelas yang meliputi pembiasaan, keteladanan, dan berbagai nilai positif lainnya, dapat berkontribusi besar bahkan terhadap kualitas institusi pendidikan itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, hal semacam ini disebut sebagai kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Prinsipnya adalah bahwa bimbingan dan arahan itu bukan hanya beban guru atau dosen semata, melainkan beban institusi dengan segenap unsur yang ada, di mana prosesnya berjalan secara 'halus' (Rosyada, 2004).

Mahasiswa selain berkewajiban menuntaskan beban akademik, mereka juga dituntut untuk melakukan *survive* di tengah masyarakat. Sebagai warga terpelajar, mereka harus mampu membumikan segenap gagasan yang dimilikinya guna turut andil dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Kompetensi tersebut dapat mereka peroleh dari program-program yang dikembangkan oleh lembaga (Imam Gunawan, Desi Eri Kusumaningrum, Teguh Triwiyanto, Wildan Zulkarnain, & Ahmad Nurabadi, 2018), baik terstruktur dalam program ekstra kurikuler maupun tidak terstruktur dalam *hidden curriculum*. Sebelum mahasiswa terlibat dalam realitas kehidupan sosial, mereka harus terbiasa dan terlatih selama menjalani proses saat menempuh pendidikan. Oleh karena itu, diadakannya program keasramaan bagi mahasiswa di STAI Sadra, selain untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan secara umum, juga disiapkan untuk menghadapi ruang kebhinnekaan (heterogenitas) dalam semangat kebersamaan dan keterbukaan, yang secara otomatis akan menumbuhkan semangat sosial seperti gotong royong, percaya diri, tanggung jawab, toleransi, serta minat belajar yang tinggi lantaran terbawa oleh arus tradisi dan praktik sosial yang berkelanjutan (Deputi Bimbingan dan Budaya, 2017).

Glatthorn dalam Rosyada mengemukakan bahwa terdapat tiga variabel yang menjadi bagian tak terpisahkan dari *hidden curriculum*, antara lain: variabel organisasi, yaitu kebijakan tentang penugasan tenaga pengajar dan pengelompokan peserta didik atau mahasiswa untuk proses pembelajaran; variabel sistem sosial, yaitu nuansa lembaga pendidikan yang terkonstruksi dari pola-pola hubungan semua unsur lembaga pendidikan; dan variabel budaya, yaitu ranah sosial yang berkaitan dengan ideologi, nilai-nilai dan struktur kognitif. Ketiga variabel tersebut jika secara konsisten diimplementasikan, maka sebuah lembaga pendidikan memiliki peluang besar dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan ekspektasi dan animo masyarakat (Rosyada, 2004).

Bertolak dari ketiga variabel di atas, secara organisasi, bidang kemahasiswaan STAI Sadra menerapkan kebijakan 'wali akademik' kepada dosen yang ditugaskan sebagai supervisor bagi mahasiswa. Kewenangan dosen yang ditunjuk dalam kebijakan tersebut berlaku untuk mahasiswa angkatan atau semester tertentu. Dalam arti, setiap angkatan memiliki Pembina atau supervisor dari unsur dosen dan berlaku sampai batas waktu yang ditentukan. Program ini dibuat untuk membantu mahasiswa secara intens dalam menjalani proses penuntasan beban akademik. Termasuk apabila terjadi suatu permasalahan pada mahasiswa menyangkut penurunan prestasi, motivasi, progres belajar dan penyelesaian studi bahkan kasus pelanggaran. Maka yang bertugas untuk menyelesaikan dan menanganinya adalah dosen yang sudah ditunjuk sebagai supervisor pada tiap-tiap angkatan atau semester (Adnani, 2020).

Pada variabel sistem sosial, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di STAI Sadra, di antaranya adalah pembinaan UKM Teosofi, yang berkonsentrasi pada diskusi-diskusi pemikiran Islam, khususnya Filsafat Islam; shalat berjama'ah dan kegiatan *maghribain* seperti *tadarrus* al-Qur'an dan pembacaan do'a-do'a; berbuka puasa bersama di bulan Ramadhan; dan tradisi peringatan hari-hari besar keislaman baik yang menjadi budaya penganut mazhab Sunni maupun Syiah seperti peringatan maulid Nabi Saw., menghidupkan malam-malam *Asyura'*, *yaumul mahabbah*, Idul Adha, Idul Ghadir dan berbagai peringatan kelahiran serta wafatnya para Imam mazhab Syiah.

Terkhusus kegiatan *ubudiyah* seperti shalat berjamaah dan *maghribain*, pelaksanaannya berjalan secara sistemik yang diatur oleh peraturan kemahasiswaan yang diturunkan secara eksplisit dalam program keasramaan. Di mana dalam praktiknya, pembagian tugas untuk memimpin shalat berjamaah (menjadi imam shalat) dilakukan secara bergantian dari pihak Sunni dan Syiah. Maka hal ini jelas berdampak pada tradisi pembacaan wirid dan do'a setelahnya yang bergantung pada latar belakang mazhab imam yang saat itu bertugas. Walaupun redaksi wirid dan do'a yang dilantunkan di setiap shalat tidak sepenuhnya dibaca, sebagaimana yang tertuang dalam panduan wirid dan do'a yang ada pada buku doa baik dalam tradisi Sunni maupun Syiah. Namun itu sudah dinilai cukup sebagai representasi tradisi kedua mazhab tersebut (Hidayatullah, 2021).

Selain itu, pengalaman heterogenitas mahasiswa STAI Sadra sebagai penganut mazhab yang berbeda satu dengan yang lainnya adalah saat pelaksanaan buka puasa di bulan Ramadhan. Sebagaimana diketahui bahwa tenggang waktu berpuasa antara muslim Sunni dan Syiah relatif berbeda. Secara umum muslim Sunni berbuka puasa saat azan dikumandangkan, baik diawali dengan makanan *ta'jil* maupun 'makan berat' secara langsung. Sedangkan bagi muslim Syiah, azan bukan merupakan waktu berbuka melainkan sebuah tanda masuknya waktu shalat maghrib. Oleh karena dalam mazhab Syiah waktu berbuka puasa adalah saat langit di sebelah timur sudah gelap, atau jika disederhanakan maka secara waktu sekira enam belas menit setelah azan dikumandangkan. Sementara itu, kebijakan keasramaan mengharuskan seluruh mahasiswa untuk berbuka puasa bersama. Hal ini menjadi salah satu ragam yang mencolok di antara mahasiswa. Maka dalam situasi semacam ini, biasanya mahasiswa Sunni terlebih dahulu membatalkan puasa mereka dengan makanan dan minuman sekedarnya untuk menghargai mahasiswa Syiah yang saat itu meyakini bahwa puasa masih berlanjut. Selain hal itu juga untuk bersiap-siap melaksanakan shalat maghrib berjamaah. Hingga saat shalat usai, mereka berbuka puasa dengan 'makan berat' secara bersama-sama (Bilgis, 2021).

Pada variabel budaya, STAI Sadra memiliki beberapa upaya yang terkait dengan itu, di antaranya adalah perumusan prinsip kultur 'madrasah sadrian' sebagai serapan istilah komunitas penganut pemikiran Mulla Shadra, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; mendorong para dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam pengisian seminar ilmiah dalam mewujudkan visi dan misi; pelayanan akademik yang memadahi baik bagi dosen, karyawan maupun mahasiswa; dan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengaturan kebijakan perencanaan, rekrutmen serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, termasuk penempatan kerja, pengembangan karir, renumerasi, bahkan aturan *reward* serta *punishment* berdasarkan sistem yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan tersebut sebagai upaya untuk mengevaluasi, memonitor dan menjaga keseimbangan yang ideal antar berbagai elemen.

Pembentukan sikap dan kebiasaan dalam tujuan pembelajaran, tentu memerlukan dukungan dari budaya lingkungan yang menjadi ajang interaksi mahasiswa. Interaksi mahasiswa dengan segenap unsur yang ada di lingkungan kampus, juga seluruh unit yang ada di bawahnya sangat menentukan dalam membentuk sikap dan kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, proses terjadinya akulturasi atau integrasi budaya pada mahasiswa di lingkungan kampus merupakan suatu konsekuensi logis yang niscaya. Kultur positif yang dialami mahasiswa dalam keseharian di lingkungan mereka berada, akan melahirkan nilai-nilai akulturasi yang positif, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks perbedaan ideologi mahasiswa, interaksi sosial antara penganut mazhab Sunni-Syiah di STAI Sadra melahirkan sudut pandang baru tentang realitas perbedaan. Sudut pandang yang muncul menjadi bekal dalam berkarya akademis dan menjadikan mahasiswa sebagai *agent of tolerance* di tengah masyarakat oleh sebab dorongan atas pemahaman pada pengalaman empirik (Adnani, 2020).

Akulturasi yang melibatkan penganut mazhab Sunni dan Syiah di STAI Sadra telah menjadi sebuah praktik sosial. Sebagaimana konsep struktural konstruktif Pierre Bourdieu, sebuah pendekatan yang menautkan peran struktur dan aktor secara dialektis, yaitu bahwa praktik sosial melibatkan habitus, modal dan ranah (Bourdieu & Johnson, 1993). Habitus merupakan kesadaran tindakan personal; struktur yang terstruktur; dihasilkan dan menghasilkan budaya. Dalam konteks ini, habitus tercermin pada sikap mahasiswa sebagai entitas personal masing-masing dengan seperangkat pemikiran yang diperoleh, yang dengannya mereka dapat memengaruhi budaya di mana mereka berada. Sedangkan ideologi yang dianut baik Sunni maupun Syiah merupakan sebuah modal atau *capital* yang berada pada ranah simbolik dan menjadi seperangkat kepercayaan yang fundamental. Adapun lingkungan STAI Sadra sebagai ranah atau medan terstruktur, yang terkonstruksi selain oleh aturan kebijakan, juga oleh peran agen atau mahasiswa yang telah dari tahun ke tahun mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Tersebut (Bourdieu, 1977). Baik mahasiswa maupun lembaga, keduanya bersimbiose menampilkan suatu budaya yang toleran, yakni toleransi antara penganut mazhab Sunni dan Syiah.

#### **b. Al-Qur'an, Filsafat dan Tasawuf sebagai Basis Pembinaan Karakter**

Sejatinya pembinaan karakter adalah bagian esensial dari tugas lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi. Sebab kewajiban lembaga pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas akademik pada pelajar atau mahasiswa, melainkan juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter mereka. Capaian akademik dan pembentukan karakter merupakan bagian integral yang harus diberikan kepada mahasiswa. Mengingat bahwa pembentukan karakter merupakan target yang dicapai

melalui sebuah pembiasaan, maka prosesnya tidak cukup hanya dengan terselenggarakannya ketuntasan akademik sebagaimana yang diterapkan melalui pelaksanaan mata kuliah. Walaupun berbeda proses dengan ketuntasan materi perkuliahan, pembentukan karakter tetap menjadi prioritas Perguruan Tinggi untuk mendidik moralitas mahasiswa. Proses pelaksanaannya membutuhkan sebuah praktik konkret sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menginternalisasikan moral dalam diri sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan, pembinaan karakter telah menjadi salah satu wacana utama untuk mendukung misi pembangunan nasional (Wahono, 2018). Maka STAI Sadra melaksanakan amanat pendidikan tersebut melalui kebijakan *boarding* bagi mahasiswa selama masa studi.

Dalam sebuah lembaga pendidikan, asrama atau *boarding* sebagai program yang bersifat non formal dapat sedemikian efektif untuk menunjang program yang terkonstruksi secara formal (Maimunah, Huda, Haque, & Zubaidah, 2021). Sebab keberadaannya bisa dijadikan sebagai ajang pendalaman serta eksplorasi dari keberlanjutan program formal (Fadil, 2020). Di bawah naungan Deputy Bimbingan dan Budaya, asrama dengan seperangkat kegiatannya merupakan program unggulan STAI Sadra untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritualitas mahasiswa. Mental yang tangguh akan mengantarkan seseorang menggapai makna hidup yang sejati. Sedangkan spiritual yang tinggi senantiasa menjadikan seseorang berada pada level manusia sejati. Oleh karenanya, seluruh mahasiswa program sarjana STAI Sadra diwajibkan menetap di asrama yang telah disediakan selama empat tahun masa studi atau delapan semester. Kebijakan tersebut tentu sebagai upaya untuk mendukung serta memperkuat *basic* integrasi keilmuan dan penguasaan bahasa asing serta pembentukan karakter mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa telah berhasil menyelesaikan masa studinya, mereka diharapkan benar-benar menjadi bagian dari kaum akademisi atau intelektual Islam (*Laporan Evaluasi Diri Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam STFI Sadra*, 2019).

Sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan, basis keilmuan yang dijadikan sebagai landasan utama dalam program *boarding* STAI Sadra adalah al-Qur'an, filsafat dan dilengkapi dengan tasawuf. Konsekuensi dari ketiga landasan tersebut adalah pertama, bahwa al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam (Rahman, 2018). Selain sebagai sumber hukum utama agama Islam karena kebenarannya yang mutlak, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai karakter atau akhlak yang terdiri dari tiga dimensi. Ketiga dimensi akhlak yang dimaksud adalah *hablun min allah* yakni tentang bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhan; *hablun min al nas* yakni tentang bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan sesama manusia; dan *hablun min al 'alam* yakni tentang bagaimana seorang hamba memperlakukan dan merawat ciptaan Tuhan yang lain (Purnamasari, 2017). Di samping itu, kandungan ajaran al-Qur'an yang bersifat universal, relevan di setiap zaman dan sarat akan petunjuk ilmiah, menuntut para pengkaji keislaman untuk mengembangkan metodologi dalam upaya memahaminya secara kontekstual. Maka selain ajarannya membumi, al-Qur'an memberikan dampak dinamisasi pada proses berpikir bagi mahasiswa (Hakim, 2015).

Kedua, diketahui bahwa filsafat identik dengan rasionalitas. Dalam sejarah peradaban Islam bahkan al-Qur'an mengisyaratkan bahwa akal, pikiran dan nalar memiliki posisi yang begitu tinggi. Hal ini di pertegas dengan kemunculan sejumlah filosof atau pemikir dalam peradaban Islam seperti Ibnu Sina, Umar Khayyam, Ibnu Rusyd, 'Ikhwan al Shafa dan pemikir Islam lainnya. Dengan begitu, filsafat merupakan basis kebangkitan peradaban Islam, sebab tanpa kecakapan filosofis yang ditandai dengan berpikir terbuka, otentik dan kritis, pengkajian terhadap khazanah Islam tak lebih dari sekedar kajian sejarah masa lampau, yang tidak dapat ditarik relevansinya dan tidak dapat

dikontekstualisasikan dengan situasi kekinian. Pengkajian filsafat secara jelas dapat menjadi sarana dalam mengasah serta mempertajam nalar mahasiswa. Selain itu filsafat juga dapat membantu pola berpikir mahasiswa dalam memecahkan kejumudan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks keagamaan, sehingga mereka tidak terjebak dalam pemahaman literal yang justru dapat mengkerdikan keluhuran citra agama itu sendiri (Heriyanto, 2016).

Ketiga, dengan ditambahkan tasawuf sebagai basis keilmuan senantiasa dapat membasahi kegersangan hidup generasi millennial akibat modernisasi yang serba hedonistik. Mengingat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seolah bagaikan sebuah pisau yang bisa membawa manfaat, namun di sisi lain juga dapat membahayakan pemilikinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jika tidak diimbangi dengan spiritualitas yang memadai akan menyebabkan krisis moral. Studi tentang tasawuf meniscayakan keseimbangan dalam mencukupi dimensi manusia yang terdiri dari materi (fisik) dan immateri (rohani) (Nuraini & Marhayati, 2019). Maka dengan dijadikannya tasawuf sebagai basis keilmuan, tak ada kekhawatiran akan terjadinya degradasi moral mahasiswa. Sebaliknya, tasawuf melengkapi capaian keilmuan sehingga menumbuhkan akhlak mahasiswa sebagai intelektual muslim yang berada pada misi ketuhanan. Dengan begitu, gabungan dari prinsip al-Qur'an, filsafat dan tasawuf diharapkan menjadikan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang spiritualis atau kaum spiritual yang intelektualis.

#### **D. KESIMPULAN**

Toleransi bermazhab, terkhusus Sunni Syiah di Perguruan Tinggi Islam dapat terwujud melalui kebijakan yang akomodatif, inklusif dan humanis baik secara formal dalam program akademik maupun non-formal yang ditunjang dengan fasilitas berupa program *boarding*. Akomodatif berarti merangkul seluruh golongan, inklusif berarti berkomitmen dalam keterbukaan dan moderat, serta humanis berarti menjunjung tinggi nilai, harkat dan martabat kemanusiaan. Pendidikan toleransi mazhab Sunni dan Syiah di STAI Sadra Jakarta membentuk sebuah praktik sosial. Di mana praktik sosial tersebut terkonstruksi secara mutualis antara lembaga dan mahasiswa yang menjalani studi. Kebersamaan dalam melaksanakan setiap program yang dirancang serta diterapkan oleh lembaga menjadi sarana dan media bagi mahasiswa untuk saling mengenal satu sama lain terkait identitas diri serta latar belakang mazhab yang dianut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mazhab bukan sebuah alasan bagi umat Islam untuk tidak hidup berdampingan dengan saudara sesama muslim. Maka setiap perbedaan yang muncul berkaitan dengan keyakinan dogma, sebisa mungkin ditutup dengan menampakkan sisi persamaannya. Dengan begitu jalinan persaudaraan antara muslim Sunni dan Syiah dapat memperkuat Islam. Sebab muslim Sunni dan Syiah sejatinya merupakan satu kesatuan yang masing-masing dapat berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam. Mengingat bahwa umat satu dengan yang lainnya bagaikan satu badan, jika salah satu anggota badan terluka, maka seluruhnya merasa sakit.

#### **REFERENSI**

- Abou-Tabickh, L. (2019). *Al-'Aşabiyya in Context Choice and Historical Continuity in Al-Muqaddima of Ibn Khaldūn* (Toronto). Toronto, Canada. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1807/97302>
- Adnani, H. (2020, November 11). *Wawancara Pribadi dengan Hasyim Adnani, Wakil Ketua Bid. Kemahasiswaan*.
- Akmaliah, W. (2015). Kekerasan dan Pengusiran atas Nama Agama Pasca Rezim Orde Baru: Studi Kasus Konflik Syiah Sampang. *Jurnal Maarif*, 10(2).

- Al-Attas, M. N., & Jāmi'at al-Malik 'Abd al-'Azīz (Eds.). (1979). *Aims and objectives of Islamic education*. Sevenoaks [Eng.] : Jeddah: Hodder and Stoughton ; King Abdulaziz University.
- Al-Badayneh, D. (n.d.). Values of Tolerance in the Curricula of University Education. *The Arab Journal*, 27(53). Retrieved from [https://www.academia.edu/37548477/\\_pdf](https://www.academia.edu/37548477/_pdf)
- Alhashmi, M., Bakali, N., & Baroud, R. (2020). Tolerance in UAE Islamic Education Textbooks. *Religions*, 11(8), 377. <https://doi.org/10.3390/rel11080377>
- Al-Walid, K. (2020, October). *Wawancara Pribadi dengan Dr. Kholid Al-Walid, Ketua STFI Sadra*.
- Anisca Dyah Permata Sari & Setyabudi Indartono. (2019). Teaching Religious Tolerance Through Social Studies Education Based on Multicultural Approach. *Atlantis Press*, 323. Retrieved from <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Asrori, A. (2016). Rekonstruksi dan Reposisi Pendidikan Islam di Indonesia Berbasis Pendekatan Pendidikan Multikultural. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1).
- Azra, A. (2014). Managing Pluralism in Southeast Asia: Indonesian Experience. *Peace Research*, 36(2).
- Bassar, A. S., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2021). Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan di Era Global dan Multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.9577>
- Bilgis. (2021, June 5). *Wawancara Pribadi dengan Bilqis Mahasiswa Angkatan 2017*.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice* (1st ed.; R. Nice, Trans.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>
- Bourdieu, P., & Johnson, R. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature*. New York: Columbia University Press.
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187-198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Deputi Bimbingan dan Budaya. (2017). *Panduan Asrama STFI Sadra*. STFI Sadra.
- Elbih, R. (2012). Debates in the Literature on Islamic Schools. *Educational Studies*, 48(2), 156-173. <https://doi.org/10.1080/00131946.2011.647147>
- Erman. (2011). Toleransi Perspektif Piagam Madinah. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v3i2.1061>
- Fadil, F. (2020). Evaluation of Input, Process, and Outputs of Ma'had Ali Program in Islamic Boarding School. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 119-138. <https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.1.119-138>
- Formichi, C. (2014). Violence, Sectarianism and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia. *Cornell University Southeast Asia Program*, 98.
- Gülen, F. (2004). *Toward a global civilization of love & tolerance*. Somerset, N.J: Light, Inc.
- Hakim, R. (2015). PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QURAN. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.2788>
- Hasanah . (2013). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KARAKTER INTI DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/jpk.v2i2.1439>
- Heriyanto, H. (2016). PERAN FILSAFAT ISLAM DALAM MEMBANGUN TRADISI KEILMUAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 81. <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i2.724>
- Hidayatullah, S. (2021, June 24). *Wawancara Pribadi dengan Syarif Hidayatullah Mahasiswa Angkatan 2018*.
- Huda, A. N. (2023). *Pendidikan Toleransi dalam Bermazhab (Studi Karakter Toleransi Sunni dan Syiah di STFI Sadra)*. Bogor: Cv. Abdi Fama Group.
- Ibnu Rusydi, & Siti Zolehah. (2018). *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161580>

- Imam Gunawan, Desi Eri Kusumaningrum, Teguh Triwiyanto, Wildan Zulkarnain, & Ahmad Nurabadi. (2018). *PENGARUH KURIKULUM TERSEMBUNYI TERHADAP MOTIVASI DIRI MAHASISWA*. Universitas Negeri Malang.
- Jirzanah. (2013). Nilai-nilai Toleransi Islam di Negara Kebangsaan Indonesia dalam Perspektif Aksiologi. *Jurnal Filsafat*, 23(1). <https://doi.org/10.22146/jf.13157>
- Khakim, M. S., Nugraha, A. F., Sukanti, S., & Sarwedi, A. R. (2020). KONTRIBUSI MAHASISWA DAERAH DALAM PENANGANAN INTOLERANSI MELALUI SINERGI PERGURUAN TINGGI DI DIY. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 62. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8361>
- Khamdan, Muh. (2016). Revitalisasi Ayat-ayat Perdamaian dalam Membendung Arus Sektarianisme. *Jurnal Farabi*, 13(2).
- Khasani, F. (2021). Etika Berbhineka: Belajar Membangun Kesadaran Multikulturalisme Dari Nabi dan Para Wali. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(02), 246–271. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.02.246-271>
- Khotimah. (2013). Toleransi Beragama. *Jurnal Ushuluddin*, 20(2).
- Kurikulum STFI Sadra. (2021). Retrieved from <https://sadra.ac.id/prodi-filsafat-islam/>
- Laporan Evaluasi Diri Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam STFI Sadra. (2019). STFI Sadra.
- Maarif, A. S. (Ed.). (2012). *Menuju persatuan umat: Pandangan intelektual Muslim Indonesia* (Ed. baru., cet. 1). Ujungberung, Bandung: kerja sama Yayasan Muslim Indonesia Bersatu [dan] Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama.
- Maimunah, I., Huda, M., Haque, A., & Zubaidah, Z. (2021). Islamic Boarding School at University: A Strong Pathway for Integrating Religion and Science. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15361>
- Moustakas, C. E. (2009). *Phenomenological research methods* (Nachdr.). Thousand Oaks: Sage.
- Muawanah. (2019). *PENTINGNYA PENDIDIKAN UNTUK TANAMKAN SIKAP TOLERAN DI MASYARAKAT* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vqgj4>
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Nuraini, N., & Marhayati, N. (2019). Peran Tasawuf terhadap Masyarakat Modern. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i2.3375>
- Nurdin, S. (2018). PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS KKN DI PERGURUAN TINGGI. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. (2017). Kementerian Sekretariat Negara. Retrieved from [https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Perpres\\_Nomor\\_87\\_Tahun\\_2017.pdf](https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf)
- Purnamasari, D. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jbk.v1i1.233>
- Purnomo, P., & Solikhah, P. I. (2021). Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>
- Rahman, A. (2018). Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme dalam Islam). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2). Retrieved from <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/5427>
- Robinson, M. (1996). Tolerance. *Furrow*, 47(1).

- Rosyada, D. (2004). *PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS Sebuah Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rosyada, D. (2014). Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1200>
- Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan* (Edisi Pertama; Murodi, Ed.). Jakarta: KENCANA.
- Rosyid, M. (2013). *Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus*. 7(1).
- Siradj, S. A. (2013). Menggagas Teologi Perdamaian Sunni-Shi'ah di Indonesia. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(2).
- Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-hak Islam minoritas. *Journal of Governance*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1312>
- Subarkah, I. (2018). Implementasi Penilaian Sikap Tasamuh (Toleransi) (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam IAINU Kebumen pada Matakuliah Ke-NU-an). *Journal Cakrawala*, 2(1).
- Tamsir, T. (2018). MEMBANGUN TOLERANSI DI SEKOLAH; Sebuah Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 68. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5721>
- TIM PENGEMBANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI. (2017). *KKNI DAN SN-DIKTI PERPRES 08/2012 & PERMENRISTEKDIKTI 44/2015*. Direktorat Pembelajaran - DETJEN BELMAWA KEMENRISTEKDIKTI. Retrieved from <https://ltdikti11.ristekdikti.go.id/download/pdf/693>
- Umam, F. (2016). MEMAKNAI KERAGAMAN: The Others dalam Konstruksi Sosial Para Elit Kelompok-kelompok Keagamaan di Kota Mataram. *Jurnal THEOLOGIA*, 27(2), 365-388. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.931>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. (2012). Retrieved from <https://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf>
- Wahono, M. (2018). PENDIDIKAN KARAKTER: SUATU KEBUTUHAN BAGI MAHASISWA DI ERA MILENIAL. *Integralistik*, 29(2), 1-7. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.16696>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2).
- Zuhdi, M. (2018). Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism. *Religions*, 9(10), 310. <https://doi.org/10.3390/rel9100310>